Journal I La Galigo : Public Administration Journal
Volume 4 Nomor 2 Oktober 2021
P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN PAJALESANG KOTA PALOPO

Kasmad Kamal, Riska Firdaus, Ishak Runi
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma, Palopo
Email : kasmadunanda@gmail.com, riska269@gmail.com, ishakruni@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi atau dengan cara lain dari kuantifikasi untuk mengukur variabel penelitian menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo, selama dua bulan yaitu pada bulan April-Juni 2021. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Kelurahan Pajalesang sebanyak 652 kepala keluarga. Teknik pengambilan sampel dilaksanakan secara acak (*random sampling*) dengan menggunakan rumus *Slovin* sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 87 responden. Pengumpulan data yang kemudian dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan empat indikator implementasi dalam pandangan Edward III, yaitu: Komunikasi dengan rata-rata 3,29, Sumber Daya dengan rata-rata 3,32, Disposisi atau sikap pelaksana dengan rata-rata 3,00, dan Struktur Birokrasi dengan rata-rata 3,30. Empat indikator tersebut membuktikan Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo berjalan dengan baik.

Kata Kunci :, *Implementasi, Bantuan Sosial Tunai, Covid-19*

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, Covid19 menjadi masalah kesehatan global. Isu ini berawal dari informasi dari World Health Organization (WHO) tanggal 31 Desember 2019, yang mengindikasikan adanya kasus pneumonia yang tidak jelas penyebabnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus memburuk hingga ada laporan kematian dari negara di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, Covid19 ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (ESPII). Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan penyakit coronavirus baru pada manusia ini sebagai penyakit coronavirus (Covid19). Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan dua kasus terkonfirmasi Covid19. Pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan Covid19 sebagai pandemi (WHO, 2020).

Pandemi Covid19 berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Dalam perekonomian, pandemi ini telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi nasional, yang tidak menutup kemungkinan penurunan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi hanya berada pada kisaran 0,4 persen hingga 2,3 persen, turun signifikan dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5%.

Pandemi Covid19 membuat perekonomian tertekan dari berbagai sudut, tidak terkecuali perekonomian di desa. Untuk saat ini, dampak Covid19 lebih banyak dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, jika dianggap pekerja musiman memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi, dari desa ke kota dan kemudian kembali ke desa, wabah Covid19 juga dapat menyebar ke desa-desa. Kegiatan mudik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri di bulan April dan Mei 2020 juga dapat meningkatkan penyebaran Covid19 di pedesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang diprioritaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan dana desa, desa juga dapat berkontribusi dalam penanganan Covid19. Penyaluran uang secara langsung merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan secara langsung untuk mendukung upaya pengurangan dampak Covid19 di tingkat rumah tangga atau masyarakat kurang mampu.

Pemberian bantuan kepada masyarakat merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan secara langsung untuk mendukung upaya pengurangan dampak Covid19 di masyarakat kurang mampu. Manfaat dana tersebut antara lain alokasi anggaran yang

P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

tersedia dalam APBN untuk pendapatan dan pengeluaran; itu dapat diubah menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain dalam hal dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru bagi aparat desa untuk segera masuk, karena mereka memahami sistem yang ada; dapat ditargetkan untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah di lapangan; serta tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas (TNP2K, 2020). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat apabila bentuk pelayanan yang diberikan bersifat transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga kepercayaan masyarakat akan terbentuk dalam indikator kepuasan (Runi, et al, 2021). Selain itu, pemerintah juga harus fokus, cepat tanggap, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kamal, et al, 2021). Hal ini dilakukan karena pelayanan publik merupakan bagian yang tak terpisah dari kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya (Syah, et al, 2021).

Terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Lebih lanjut, dalam penjelasan Perppu disebutkan bahwa penggunaan bantuan langsung tunai di masyarakat dapat digunakan antara lain untuk bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat miskin di berbagai daerah dan kegiatan dalam rangka menghadapi pandemi Covid19 . Dengan adanya pasal dan penjelasan tersebut maka diperlukan kajian terhadap kebijakan tersebut agar dapat diimplementasikan dengan cepat. Anggaran dana pada 2020 ditetapkan sebesar Rp72 triliun untuk kebutuhan BST dan akan mengalokasikan 20-30 persen dari total dana yang ada. Pelaksanaan BST dapat dilakukan minimal enam bulan, dengan sasaran penerima manfaat adalah rumah tangga yang terdampak covid19. Sasaran tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar program bansos nasional adalah penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Sosial Tunai.

Kelurahan Pajalesang merupakan kelurahan yang ada di Kota Palopo yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi Covid-19. Pengamatan peneliti di lapangan mengenai implemantasi Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat miskin terdampak Covid 19 peneliti melihat banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain yaitu masyarakat kurang mengetahui apa saja kriteria penerima BST dan bagaimana proses pendataannya, apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada ataukah didata ulang. banyak masyarakat kebingunan terhadap pendataan yang dilakukan pihak kelurahan pajalensang terkait pendataan yang dilakukan apakah mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik masyarakat dan bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri.

Data awal yang diperoleh bahwa dari daftar yang menerima bantuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai

Kelurahan Pajalesang	Menerima Melalui	
Penerima BST	Kantor Kelurahan	Kantor Pos
	374	278
Jumlah Kepala Keluarga	652	

Sumber : Kelurahan Pajalesang, 2021

Dari data yang diperoleh, jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Pajalesang sebanyak 1.401 jumlah kepala keluarga tetapi yang mendapatkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 652 kepala keluarga. Kondisi demikian sempat menimbulkan konflik di antara masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dianggap bahwa pemerintah masih kurang jelas atau kurang berjalan efektif dalam memetakan sasaran Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan

P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

menggunakan alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif**.** (Sugiyono, 2016).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo, selama dua bulan yaitu pada bulan bulan April-Juni 2021. Pertimbangan utama pemilihan lokasi tersebut adalah berdasarkan studi penjajakan awal yang dilakukan penulis, yang menunjukkan adanya masalah yang ingin diteliti mengenai Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo, belum maksimal dilaksanakan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Kelurahan Pajalesang yang mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) berdasarkan kepala keluarga dengan jumlah 652 kepala keluarga. Sedangkan teknik pengambilan sampel dilaksanakan secara acak (*random sampling*) dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga sampelnya adalah 87 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Observasi, yaitu kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan pada topik penelitian. Observasi dalam penlitian ini adalah dengan melihat secara langsung tentang pembagian bantuan sosial tunai di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo.
2. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data di mana daftar pertanyaan dengan alternatif jawaban dibagikan kepada responden dalam bentuk angket.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari instansi terkait tentang masalah yang diselidiki dengan menggunakan catatan tertulis di lokasi penelitian dan sumber lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskritif adalah Statistika digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku secara umum atau membuat generalisasi. (Sugiyono, 2016). Untuk menilai tanggapan setiap responden, penulis menggunakan skala Likert; yaitu semua pertanyaan yang dijawab diberi bobot dan jumlah totalnya dihitung untuk menentukan nilai masing-masing responden. Bobot jawaban responden diberi nilai rinci sebagai berikut :

Skor Alternatif Jawaban Responden Terhadap Kuesioner Penelitian Alternatif Pilihan Jawaban, (Sugiyono, 2016):

a. Tidak Baik (TB) : Skor 1
b. Cukup Baik (CB) : Skor 2
c. Baik (B) : Skor 3
d. Sangat Baik (SB) : Skor 4

Berdasarkan skala tersebut, maka dapat dihitung interval data sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{skor tertinggi } (4) - \text{skor terendah } (1)}{\text{Jenjang data } (4)} = 0{,}75$$

Kategori :

a. 00 – 1,75 = Tidak Baik (TB)
b. 76 – 2,50 = Cukup Baik (CB)
c. 2,51 – 3,25 = Baik (B)
d. 3,26 – 4,00 = Sangat Baik (SB)

HASIL PENELITIAN

Widodo, 2010) mengatakan bahwa, implementasi adalah suatu proses yang membutuhkan berbagai sumber daya, termasuk manusia, keuangan dan keterampilan operasional, di pihak pemerintah dan sektor swasta (individu dan kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pembuat kebijakan. Untuk menjawab masalah penelitian tentang Implementasi Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo, maka digunakan teori Edward III (1984), dengan jumlah responden sebanyak 87 orang. Hasil penelitiannya dapat dilihat sebagai berikut.

Deskripsi Frekuensi Responden

Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan kurang lebih dua bulan dengan jumlah responden sebanyak 87 orang. Memperjelas deskripsi frekuensi responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai data responden seperti dijelaskan berikut ini :

Tabel 2. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase (%)
Laki-laki	59	67,8
Perempuan	28	32,2
Total	87	100

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang ada dalam penelitian ini yang paling banyak yaitu berjenis kelamin laki-laki yaitu 67,8% atau 59 orang. Hal tersebut karena

P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

penerima BST lebih banyak diwakilkan oleh laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga.

Tabel 3. Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
18-25 Tahun	8	9,2
26-33 Tahun	21	24,1
34-41 Tahun	40	46
< 42 Tahun	18	20,7
Total	87	100

Sumber : Data diolah, 2021

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang ada dalam penelitian ini yang paling banyak berusia 34-41 yaitu 46% atau sebanyak 40 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerima BST kebanyakan dari masyarakat yang sudah berkeluarga.

Tabel 4. Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Akhir	Jumlah (orang)	Presentase (%)
SMA	53	60,9
D3	13	14,9
S1	17	19,5
S2	4	4,6
S3	0	0
Total	87	100

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang ada dalam penelitian ini yang paling banyak berpendidikan SMA yaitu 60,9% atau 53 orang. Banyaknya responden yang berpendidikan SMA artinya bahwa kebanyakan pekerjaannya tidak tetap sehingga menjadi prioritas penerima BLT.

Deskripsi Variabel Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo akan digunakan empat indikator implementasi dalam pandangan Edward III (1984), yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau sikap pelaksana dan Struktur Birokrasi

1. Komunikasi

Komunikasi dipahami sebagai instrumen atau aktor kebijakan, yang berfungsi untuk mengarahkan perintah dan instruksi para pengambil keputusan kebijakan atau aktor yang berwenang untuk memandu proses implementasi kepada lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi. Komunikasi diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kepatuhan bagi pelaksana sehingga mereka mengetahui dan memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan semua pelaksana perlu memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk menghindari atau meminimalkan penyimpangan.

Implementasi akan lebih efektif jika semua pejabat eksekutif memahami standar, tujuan, dan sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang apa yang telah terbukti dan perlunya komunikasi dari tingkat atas sampai bawah secara konstan.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan indikator komunikasi, akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Komunikasi

No	PERNYATAAN	Jumlah Jawaban				Rata-rata	Ket
		TB	CB	B	SB		
		1	2	3	4		
1	Komunikasi antara masyarakat dan Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terjalin dengan baik	2	5	42	38	3,33	Sangat baik
2	Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) selalu mengkomunikasikan tentang Programnya kepada masyarakat	0	13	37	37	3,27	Sangat Baik
3	Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) selalu mensosialiasikan terkait Programnya	2	11	32	42	3,31	Sangat Baik
JUMLAH		4	29	111	75	3,29	Sangat Baik

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5 jawaban responden mengenai indikator komunikasi, bahwa dari ketiga pernyataan indikator komunikasi menunjukkan persentase tertinggi pada pernyataan nomor satu dengan rata-rata skor 3,33. Tingginya pernyataan ini dikarenakan Komunikasi antara masyarakat dan pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terjalin dengan baik, dimana komunikasi yang baik merupakan metode untuk menerapkan implementasi. Komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi sebagaimana dikemukakan oleh (Solichin, 2017) bahwa komunikasi memainkan peran penting bagi berlangsungnya implementasi pada umumnya. Perkembangan pengetahuan manusia dapat dilihat dari komunikasi sehari-hari. Komunikasi juga merupakan suatu sistem sosial yang saling membutuhkan, sehingga komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan**.** (Cangara, 2014), seperi halnya yang digunakan oleh pihak

P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terjalin dengan baik di Kelurahan Pajalesang.

2. Sumber Daya

Suatu kebijakan memerlukan ketersediaan sumber daya karena sumber daya merupakan variabel yang secara langsung mempengaruhi efektivitas kebijakan. Sebaik apapun sebuah kebijakan, jika tidak didukung dengan baik, akan sulit untuk diimplementasikan. Kenyataannya, program pembangunan seringkali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada sejauh mana sumber daya yang ada dapat dioptimalkan dengan baik dan memadai..

Distribusi frekuensi responden berdasarkan indikator sumber daya, akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Sumber Daya

No	PERNYATAAN	Jumlah Jawaban				Rata-rata	Ket
		TB	CB	B	SB		
		1	2	3	4		
1	Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) melakukan seleksi Sumber Daya Manusia dalam penerapan programnya	2	8	43	34	3,25	Sangat baik
2	Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) selalu melakukan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia yang dimiliki	0	12	44	31	3,21	Baik
3	Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak memebedakan mayarakat yang akan mendapatkan bantuan	0	6	30	51	3,51	Sangat Baik
JUMLAH		2	26	117	116	3,32	Sangat Baik

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6 jawaban responden mengenai indikator sumber daya, bahwa dari ketiga pernyataan indikator sumber daya menunjukkan persentase tertinggi pada pernyataan nomor tiga dengan rata-rata 3,51. Tingginya pernyataan ini dikarenakan Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak membedakan mayarakat yang akan mendapatkan bantuan. Sumber daya adalah faktor yang juga mempengaruhi implementasi (Ariyani, dkk., 2014). Sumber daya penelitian ini adalah masukan yang digunakan untuk menyukseskan pelaksanaan program berupa sumber daya manusia, data dan informasi pendukung, serta sarana, prasarana. Sumber daya manusia yang tidak membedakan masyarakat dalam memberikan bantuan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi untuk menerapkan program implementasi, seperi sumber daya yang ada di Kelurahan Pajalesang.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan sangat penting untuk keberhasilan program. Sikap penerimaan dan penolakan para pelaku pelaksana harus menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program yang ingin dicapai. Hal ini dapat terjadi karena suatu kebijakan bukanlah hasil perumusan seorang warga negara yang memahami permasalahan yang muncul. Dukungan dari pelaksana sangat berguna untuk mengimplementasikan program ini dengan baik. Dengan dukungan dari pelaksana, komitmen pelaksana untuk terus melakukan program ini dengan baik menjadi kenyataan.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan indikator disposisi atau sikap pelaksana, akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Disposisi atau Sikap Pelaksana

No	PERNYATAAN	Jumlah Jawaban				Rata-rata	Ket
		TB	CB	B	SB		
		1	2	3	4		
1	Sikap Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki tanggung jawab yang baik dalam penerapan programnya	0	7	38	42	3,40	Sangat baik
2	Pihak Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak membedakan masyarakat dalam penerapan programnya	7	44	25	11	2,45	Cukup Baik
3	Pihak Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) selalu bersikap baik kepada masyarakat	0	14	45	28	3,16	Baik
JUMLAH		7	65	108	81	3,00	Baik

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 7 jawaban responden mengenai indikator disposisi atau sikap pelaksana, bahwa dari ketiga pernyataan indikator disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan persentase tertinggi pada pernyataan nomor satu dengan rata-rata skor 3,40. Tingginya pernyataan ini dikarenakan sikap pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki tanggung jawab yang baik dalam penerapan programnya. Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai dukungan tim koordinasi dan anggota tim kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang tercermin dalam komitmen untuk melaksanakan program (Ariyani, dkk., 2014). Tanggug jawab merupakan suatu cara agar implementasi berjalan dengan baik, seperti

P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

yang dilakukan oleh pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam penerapan implemantasi di Kelurahan Pajalesang.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi tidak lepas dari struktur birokrasi atau struktur organisasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi yang melaksanakan implementasi. Struktur birokrasi dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Edward III (1984) Struktur birokrasi dilihat dari adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur alur kerja dan pelaksanaan program atau prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja proses implementasi kebijakan. Dalam SOP ini perlu untuk menghindari fragmentasi yang sering terjadi dalam suatu organisasi, namun dapat diatasi melalui mekanisme koordinasi.

Implementasi kebijakan pemerintah pada umumnya akan melibatkan berbagai pembuat kebijakan yang berusaha mempengaruhi perilaku birokrat atau pelaksana di bidangnya untuk memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat atau untuk mengatur perilaku satu atau lebih kelompok sasaran. Dengan kata lain, selalu banyak organisasi atau instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan indikator struktur birograsi, akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi

No	PERNYATAAN	Jumlah Jawaban				Rata-rata	Ket
		TB	CB	B	SB		
		1	2	3	4		
1	Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mempunyai hubungan yang baik antara masyarakat	2	11	32	42	3,31	Sangat baik
2	Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mudah dijangkau semua masyarakat	0	12	43	31	3,21	Baik
3	Aturan Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mudah dipahami oleh masyarakat	0	7	34	42	3,40	Sangat Baik
JUMLAH		2	30	109	115	3,30	Sangat Baik

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 8 jawaban responden mengenai indikator struktur birokrasi, bahwa dari ketiga pernyataan indikator struktur birokrasi menunjukkan persentase tertinggi pada pernyataan nomor tiga dengan rata-rata skor 3,40. Tingginya pernyataan ini dikarenakan aturan Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mudah dipahami oleh masyarakat. Mudahnya dipahami Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Pajalesang membuktikan bahwa implementasi program Program Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan baik. Edward III (1984) menyatakan bahwa pelaksana dapat terhambat oleh struktur organisasi di mana mereka melayani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III (1984) yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur Birokras, dapat disimpulkan sebgai berikut.

1. Komunikasi, yang diperoleh dalam penelitian ini berjalan dengan sangat baik karena komunikasi antara masyarakat dan pihak Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 terjalin dengan baik dengan rata-rata skor 3,29 berada pada interval 3,26 – 4,00 kriteria Sangat Baik.
2. Sumber Daya yang diperoleh dalam penelitian berjalan dengan sangat baik karena pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak memebedakan mayarakat yang akan mendapatkan bantuan dengan jumlah 3,32 berada pada interval 3,26 – 4,00 dengan kreteria Sangat Baik.
3. Disposisi yang diperoleh dalam penelitian ini berjalan dengan baik karena sikap pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki tanggung jawab yang baik dalam penerapan programnya dengan jumlah 3,00 berada pada interval 2,52 - 3,25 kreteria Baik.
4. Struktur Birokrasi yang diperoleh dalam penelitian ini berjalan dengan sangat baik karena aturan Pihak Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mudah dipahami oleh masyarakat 3,30 berada pada interval 3,26 – 4,00 kreteria Sangat Baik.

Keempat indikator tersebut di atas mampu membuktikan bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pajalesang Kota Palopo berjalan dengan sangat baik.

Saran

Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi Covid-19 di

Kelurahan Pajalesang Kota Palopo, diharapkan lebih ditingkatkan agar kepuasan masyarakat dapat tercapai dan Pelayanan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi Covid-19 dalam penerapannya sebaiknya dijelaskan sedetail mungkin tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan kepada warga Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

REFERENSI

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. *Alfa Beta*.

———. 2020. "Analysis of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience of Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator*.

Ariyani, Dini, Abdul Hakim, and Irwan Noor. 2014. "Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari* 5 (2): 15–21.

Cangara. 2014. "Roudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: UIN Press, 2007) h. 27 23," 23–45.

Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, and Denok Kurniasih. 2017. "Implementasi Kebijakan Dana Desa." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3 (2): 12–32. https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921.

Edward III, George C. 1984. "Public Policy Implementing." *Literary and Linguistic Computing*.

Firdaus, Riska. 2020. "Implemetasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara." *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* 3 (2): 1–8.

Kamal, Kasmad, Muhammad Ardiansyah Makmur, and Andi Ni. 2021. "One Stop Service : A Way to Reform Public Service," 4484–91.

Pemerintah Republik Indonesia. 2019. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N" 2019 (1): 46.

Runi, Ishak, Arif Ferdian, and Zulkifli Darwis. 2021. "Crisis of Trust in the Government in Handling COVID-19 in Palopo City," 4464–70.

Solichin, Abdul Wahab. 2017. "Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik." *Bumi Akasara, Jakarta*.

Sugiyono, Prof.Dr. 2016. metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D Alfabeta, cv.

Syah, Syahiruddin, Riska Firdaus, and Musyrifah Mahfuddin. 2021. "Determinant Factors in Improving Services Quality Strategies at the National Land Agency North Luwu Regency , South Sulawesi , Indonesia," 4471–83.

TNP2K. 2020. "Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa." *Unit Riset Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 1–8.

WHO. 2020. "WHO Director-General's Remarks at the Media Briefing on 2019-NCoV on 11 February 2020." World Health Orgnatization (WHO). 2020.

Widodo, Joko. 2010. "Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik." *Malang: Bayu Media*.